BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan secara umum merupakan usaha untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki setiap individu, sehingga menjadi pribadi yang lebih berkembang dan maju. Melalui pendidikan setiap individu dididik agar dapat menjadi manusia yang berguna dalam kehidupannya serta bagi negara, nusa dan bangsa. Lingkungan keluarga merupakan pendidikan informal pertama yang diperoleh setiap individu dan selanjutnya didukung melalui pendidikan formal di sekolah. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilaksanakan siswa secara sadar dan sistematis melalui proses pembelajaran di sekolah pada pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Melalui pendidikan formal di sekolah diharapkan setiap individu mampu mengembangkan seluruh aspek potensi yang dimiliki, yaitu aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sesuai dengan ketentuan UU Pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah:

> "Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Dalam pendidikan formal, keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari kurikulum yang digunakan. Menurut Dakir (2010:3), kurikulum adalah program pendidikan yang memuat berbagai bahan ajar yang telah direncanakan dan dirancang secara sistematis untuk keberhasilan tujuan pendidikan. Kurikulum diibaratkan sebagai jantung pendidikan, apabila jantung berfungsi dengan baik

maka seluruh anggota badan yang lainnya berfungsi dengan baik pula. Maka dari itu, kurikulum merupakan bagian penting dari pendidikan. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaruh globalisasi yang terus berubah, kurikulum akan terus mengalami perubahan, dan karena bersifat dinamis, kurikulum erat kaitannya dengan kemajuan dan pertumbuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berbangsa (Kurniasih & Berlin Sani, 2014:3). Selain itu juga kurikulum merupakan bagian dari proses pembelajaran yang akan terus mengalami pembaruan seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat (Nugraha, dkk. : 2022). Perubahan dan pembaruan dalam kurikulum dimaksudkan agar kurikulum dapat menjawab tantangan jaman yang semakin maju dan tidak dapat dicegah arus perubahannya, serta dalam rangka mempersiapkan siswa yang diharapkan dapat bersaing dimasa yang akan datang dengan segala perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya sehingga tujuan pendidikan dapat terlaksana. Sesuai yang termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 36 ayat 1 menerangkan bahwa “Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

Implementasi kurikulum yaitu penerapan kurikulum yang sudah dirancang atau didesain. Pendidikan di Indonesia saat ini tengah mengimplementasikan kurikulum 2013 sebagai bagian dari rangkaian penyempurnaan kurikulum yang sebelumnya diterapkan pada tahun 2004, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, kemudian dilanjutkna dengan kurikulum 2006 yaitu Kurikulum Tinngkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Mulyasa, 2019). Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2009-2014 menerangkan bahwa “Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan” (M. Nuh, 2014). Sehingga pembentukan dan pengembangan karakter siswa dalam kurikulum 2013 lebih ditekankan, karena dalam kurikulum 2013 bertujuan agar pendidikan karakter dapat lebih memajukan kualitas proses belajar dan hasil belajar siswa, lebih memperhatikan pembentukan karakter dan akhlak mulia siswa, serta menyesuaikan dengan kemampuan lulusan dari satuan pendidikan pada semua jenjang secara komprehensif, seimbang, dan lengkap. Melalui penerapan kurikulum 2013 berbasis kompetensi dan berbasis karakter, siswa diharapakan dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dirinya secara mandiri, dapat mengkaji dan mengimplementasikan nilai-nilai karakter serta akhlak mulia didalam kehidupannya sehari-hari. Untuk itu siswa didorong agar dapat lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, keterampilan interpersonal, antarpersonal, serta mempunyai keterampilan berpikir kritis. Sehingga menciptakan generasi yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter (Kurniasih & Berlin Sani, 2014:7). Sebagaimana telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 menerangkan:

> “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Salah satu aspek yang menjadi perubahan dan penataan dalam kurikulum 2013 yaitu mengenai perancangan standar penilaian sebagai suatu sistem penilaian baru dalam mengamati pencapaian yang berhasil dalam proses pembelajaran. Penilaian kurikulum 2013 terdiri dari tiga aspek, yakni: Pengetahuan, keterampilan

dan sikap, secara holistik dan proporsional, berdasarkan kompetensi inti yang ditetapkan. Adapun dalam pelaksanaan penilaian sikap terdapat dua aspek penilaian yakni sikap spiritual dan sikap sosial. Dalam aspek sikap sosial inilah *civic disposition* dijadikan sebagai salah satu penilaian dalam pengembangan watak/karakter siswa.

Civic disposition sangat erat kaitannya dengan karakter siswa dalam kehidupannya selaku warga negara atau anggota masyarakat. Menurut Branson (1999:8-25) kompetensi kewarganegaraan terbagi menjadi 3, yaitu: 1) Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), berkenaan dengan apa yang harus dipahami seseorang sebagai warga negara; 2) Kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), yaitu keterampilan intelektual dan partisipasi warga negara; 3) Watak kewarganegaraan (*civic disposition*), yaitu berkaitan dengan watak/karakter warga negara.

Pembentukan dan pengembangan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) di sekolah salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan yang menjadi sarana untuk menginternalisasikan nilai-nilai sosial. Pendidikan Kewarganegaraan (*civic Education*) Menurut Winataputra & Budimansyah (2007:4), merupakan disiplin ilmu yang bertujuan dalam pembentukan karakter bangsa, yaitu upaya sadar untuk membentuk "*nation and character building*". Selain itu, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan membantu dalam pembentukan kematangan yang mengubah warga negara hipotetik menjadi warga negara yang siap untuk menjalani kehidupannya di lingkungan masyarakat (Nugraha, dkk. : 2022). Dalam penelitiannya Susanto & Kokom Komalasari

(2015:73) menjelasakan mengenai hubungan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan pembentukan *civic disposition* bahwa "pendidikan kewarganegaraan sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praktis pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor *value-based education*".

Namun, dalam pelaksanaan pembelajaran disaat pandemi *covid-19* yang mengharuskan kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan melalui *online* atau daring (dalam jaringan) dari rumah terdapat kontradiksi antara tujuan pendidikan nasional dengan realitas sosial yang terjadi terutama pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang merupakan disiplin ilmu yang mempunyai misi dalam proses pembentukan warga negara yang baik, serta mampu menjalankan hak dan kewajiban. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat siswa yang lalai dalam menuntaskan kewajibannya sebagai seorang pelajar yang seharusnya menyelesaikan tugasnya dalam belajar. Hal tersebut terlihat ketika guru memberikan tugas dan pada saat waktu pengumpulan tugas masih banyak yang tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu bahkan masih terdapat siswa yang tidak mengumpulkan tugasnya. Fenomena yang terjadi tersebut merupakan salah satu menurunnya watak kewaarganegaraan (*civic disposition*) yang berkaitan dengan sikap tanggung jawab (*civic responsisbility*) dan disiplin sebagai seorang siswa.

Menurunnya *civic disposition* siswa dalam hal ini sikap tanggung jawab siswa dalam menuntaskan tugas belajarnya ditemukan di SMP Negeri 1 Telukjambe Barat. Hal tersebut diketahui pada saat wawancara awal dengan guru

mata pelajaran PPKn kelas 8 menerangkan bahwa saat pembelajaran daring dilaksanakan hanya sebagian siswa saja yang terlibat aktif ketika proses pembelajaran. Masih terdapat siswa yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran daring baik itu melalui *google classroom* maupun melalui grup *whatsapp*. Hal tersebut menjadi kendala guru dalam memberikan materi pembelajaran dan tugas, selain itu berdampak pula terhadap penilaian yang dilaksanakan guru terutama dalam penilaian aspek sikap sosial. Padahal melalui penilaian sikap dapat melihat perubahan dan pembentukan watak atau karakter setiap siswa. Namun, dalam pelaksaaan pembelajaran daring penilaian sikap kurang maksimal penerapannya karena pembelajaran daring yang lebih sering menggunakan pesan melalui grup *whatsapp* maupun *google classroom*, sehingga guru mengalami kendala ketika pelaksanaan penilaian sikap karena guru tidak dapat melihat secara langsung kondisi siswa yang sebenarnya ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sehingga penilaian sikap hanya dilihat dari keaktifan siswa ketika pengumpulan tugas dan hal tersebut menjadi kendala guru ketika pengisian penilaian sikap dalam raport/laporan hasil belajar siswa karena tidak semua sikap sosial dapat diamati guru.

Dari uraian latar belakang, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut agar dapat membantu guru dalam memaksimalkan penilaian sikap, terutama sikap aspek sosial pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pembentukan *civic disposition* terutama sikap tanggung jawab dan disiplin dengan judul "**Pengaruh Penilaian Aspek Sikap Sosial Terhadap Pembentukan *Civic***

Disposition **Siswa Pada Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**".

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang dikemukakan beberapa identifikasi masalah, yakni:

1. Peran pendidikan informal dan formal dalam pembentukan *civic disposition* siswa.
2. Kurang maksimalnya guru dalam pelaksanaan penilaian sikap sosial ketika proses pembelajaran dilaksanakan secara *online*/daring (dalam jaringan).
3. Menurunnya watak kewarganegaraan (*civic disposition*) terutama sikap tanggung jawab (*civic responsibility)* dan disiplin siswa dalam proses pembelajaran *online*/daring.
4. Guru mengalami kendala ketika pelaksanaan penilaian aspek sikap dimasa pandemi.

C. Pembatasan Masalah

Dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini memiliki batasan yaitu berkaitan dengan pengaruh penilaian aspek sikap sosial terhadap pembentukan *civic disposition* siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, selanjutnya rumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah penilaian aspek sikap sosial berpengaruh positif signifikan terhadap pembentukan *civic disposition* siswa?
2. Seberapa besar tingkat pengaruh penilaian aspek sikap sosial terhadap pembentukan *civic disposition* siswa?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif signifikan penilaian aspek sikap sosial terhadap pembentukan *civic disposition* siswa.
2. Untuk mengetahui tingkat pengaruh penilaian aspek sikap sosial terhadap pembentukan *civic disposition* siswa.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi beberapa pihak berikut ini.

1. Bagi peneliti: dapat menelaah secara kritis mengenai pengembangan penilaian aspek sikap sosial dalam kurikulum 2013 sehingga dapat mencapai kompetensi penilaian aspek sikap dalam pembentukan *civic disposition* siswa.
2. Bagi sekolah: dengan dilakukannya penelitian ini serta hasil yang diberikan dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan sekolah

terutama dalam pembentukan *civic disposition* siswa melalui penilaian aspek sikap sosial.

3. Bagi guru: diharapkan dapat mengembangkan penilaian aspek sikap sosial dalam pembentukan *civic disposition* siswa.
4. Bagi siswa diharapkan siswa dapat mengetahui penilaian aspek sikap dalam kurikulum 2013 yang dilakukan oleh guru dapat membentuk *civic disposition* terutama sikap tanggung jawab sehingga berguna bagi kehidupannya di lingkungan keluarga, sekolah, maupuan masyarakat.
5. Bagi peneliti lain: diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat menjadi referensi tentang penilaian aspek sikap sosial dalam pembentukan *civic disposition* siswa.

UBP KARAWANG